

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURUSUTAMAAN  
GENDER DALAM PARTISIPASI PUBLIK  
PEREMPUAN DI KABUPATEN  
GORONTALO UTARA**

**Oleh**

**MENONG ABDULLAH  
NIM : S2117125**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEREMPUAN DI KABUPATEN**  
**GORONTALO UTARA**

Oleh:

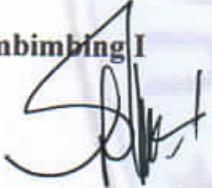
**MENONG ABDULLAH**  
**NIM: S2117125**

**SKRIPSI**

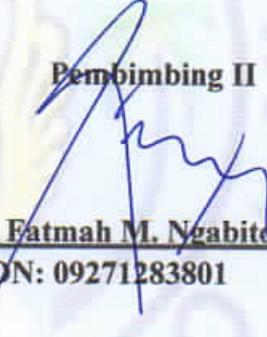
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo  
Yang Telah Di Setujui Pada Tanggal 05 Juni 2021

Menyetujui

Pembimbing I

  
Darmawaty Abdul Razak, S.I.P., M.AP  
NIDN: 0924076701

Pembimbing II

  
Dr. Fatmah M. Ngabito, S.I.P., M.Si  
NIDN: 09271283801

Mengetahui

Ketua Jurusan ~~Jurusan~~ Pemerintahan  
Universitas Ichsan Gorontalo

  
Darmawaty Abdul Razak, S.I.P., M.AP  
NIDN: 0924076701

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN**  
**GENDER DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEREMPUAN**  
**DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
Oleh:

**MENONG ABDULLAH**

NIM: S2117125

**SKRIPSI**

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Di Setujui Oleh Pembimbing Pada  
Tanggal 05 Juni 2021

**TIM PENGUJI**

1 Dr.Arman, S.Sos., M.Si

(.....)

2. Marten Nusi, S.Ip., M.AP

(.....)

3. Sandi Prahara, S.T., M.Si

(.....)

4. Darmawaty Abdul Razak, S.Ip., M.AP

(.....)

5. Dr. Fatmah M. Ngabito, S.Ip., M.Si

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial Dan Ilmu politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
MDN. 09130788602

Ketua Program studi  
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.Ip., M.Ap  
NIDN.0924076701

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara” adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedian menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.



## ***ABSTRACT***

### ***MENONG ABDULLAH. S2117125 IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING POLICY IN WOMEN'S PUBLIC PARTICIPATION IN NORTH GORONTALO DISTRICT***

*This study aims at analyzing the implementation of gender mainstreaming policy in women's public participation in North Gorontalo District. This study employs the qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that: 1) women's access to the implementation of gender mainstreaming policies in women's public participation in North Gorontalo District is not optimal and less balanced. There is a disparity in the perspectives between the government and society. The government considers the acceleration of Responsive Gender Planning and Budgeting has been running optimally, but the public views women in public participation as not quite balanced compared to the men's role; 2) The factors that determine the success of implementing gender mainstreaming policies in women's public participation in North Gorontalo Regency are influenced by the policies issued by the District Head and Regional Secretariate regarding the acceleration of Responsive Gender Planning and Budgeting. However, it has not been maximized by the Regional Apparatus Organizations considered less responsive in solving the problems about Responsive Gender Planning and Budgeting*

*Keywords:* village government, community empowerment

## **ABSTRAK**

### **MENONG ABDULLAH. S2117125 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEREMPUAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akses perempuan terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara belum optimal dan kurang seimbang. Terdapat perbedaan antara pendapat pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menganggap percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) sudah berjalan dengan optimal akan tetapi pendapat masyarakat tentang perempuan dalam partisipasi publik belum cukup seimbang dibandingkan dengan laku-laki; 2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara dipengaruhi oleh Kebijakan Bupati Dan Sekretaris Daerah terkait percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). Akan tetapi hal ini belum dimaksimalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap kurang responsif dalam menyelesaikan PPRG.

Kata kunci: pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“\_ ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri. \_”*

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah swt yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tua sebagai inspirasi dalam hidup yang memberikan semangat dan doa-doanya untukku.
3. Untuk suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat dari segi moril atau material.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

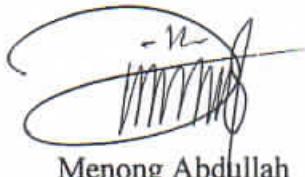
Puji syukur kepada Allah S.W.T, karena dengan kuasanya skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan Di Kabupaten Gorontalo Utara” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini sengaja dibuat sebagai salah satu persyaratan terselesaiannya strata 1 Di Universitas Ichsan Gorontalo.

Peneliti menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu apabila terdapat kekhilafan didalamnya mohon di maklumi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda, Yakop Abdullah dan Ibunda, Nurjana Pulu,Serta Suami tercinta,Fikriyanto Toolingo. Bapak Ketua Yayasan PIPT Ichsan Gorontalo Ichsan Latjockke, M.AK, Bapak Dr. Abdul Gaffer Latjockke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman S. Sos M. Si selaku Dekan Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo,Bapak Marten Nusi S.IP M.AP selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,ibu Wakil Dekan 2 Ibu Dwi Ratna Sari S.Sos M.Kom,Bapak Ramansyah S,Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan 3, Ibu Dr Fatma Ngabito S.IP M.SI selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini, ibu Darmawaty Abdul Razak S.IP M,AP selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini,terimakasih juga saya dan kepada teman-teman seangkatan 2017/2018 Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu

membantu memberikan konstribusi berupa ide-ide dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Gorontalo, 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Menong Abdullah". The signature is fluid and cursive, with a large loop on the left and more vertical strokes on the right.

Menong Abdullah

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan penelitian.....	4
1.4. Manfaat penelitian.....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender.....	6
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
2.3. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Pengarusutamaan Gender Terhadap Partisipasi Perempuan.....	17
2.4. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>

3.1. Objek Penelitian.....	23
3.2. Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Pendekatan Penelitian.....	23
3.2.2 Fokus Penelitian.....	23
3.2.3 Informan Penelitian.....	23
3.2.4 Sumber Data Penelitian.....	24
3.3 Teknik Analisi Data.....	24
3.4 Pengecekan Keabsahan Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	29
4.2.1. Akses Perempuan Terhadap Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan Di Kabupaten Gorontalo Utara.....	30
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan Di Kabupaten Gorontalo Utara.....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2. Saran.....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi public yang melibatkan individu individu baik itu laki laki maupun perempuan, yang turut berperan dalam pengambilan kebijakan. Sebagaimana pendapat Dwiyanto (2015:37) “Partisipasi publik adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka.”

Pada esensinya keterlibatan laki-laki dan perempuan dilembaga-lembaga eksekutif dan legislatif bukan hal yang baru. Secara historis, keterlibatan laki-laki dan perempuan sudah sejak lama dilembaga-lembaga pengambil keputusan. Namun khusus bagi perempuan keterlibatannya masih belum terlalu besar perannya dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah agar bisa serta dalam proses pembangunan. Ini bisa dilihat dari lemahnya posisi perempuan dibirokrasi yang lebih dominan diposisi staf dan bukan diposisi pengambil kebijakan. Masih sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi sebagai pimpinan.

Realitas lainnya menunjukan, meski secara konstitusional perempuan diakui sama kedudukannya dengan laki-lai sebagai warga Negara untuk bisa mengambil bagian dalam berbagai segi kehidupan baik politik, birokrasi, ekonomi, hukum, sosial maupun budaya, namun pada prakteknya, pengakuan konstitusional tersebut masih sebatas normatif, hal ini terlihat dalam praktek

kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan, dimana terlihat keterwakilan perempuan diparlemen maupun dilembaga eksekutif masih terbatas jumlahnya, apalagi jika di fokuskan pada keterlibatannya dalam jabatan-jabatan strategis dibirokrasi pemerintahan. Baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun Daerah.

Pada pelaksanaanya khususnya dikabupaten Gorontalo Utara, peran partisipasi publik perempuan walaupun ada, namun dalam tataran implementasinya belumlah sesuai dengan harapan, hal ini dapat terlihat dengan minimnya perempuan yang menduduki jabatan strategis baik dibirokrasi, maupun dilegislatif, begitu pula sangat minimnya peran aktifis-aktifis perempuan dalam menyuarakan aspirasi perempuan, belum sangat nampak terlihat peran perempuan dalam menggerakan perekonomian keluarga serta bidang lainnya, sebab pada dasarnya masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga itu perlu adanya suatu regulasi atau kebijakan yang khusus dilakukan oleh pemerintah daerah, agar peran perempuan semakin nyata dalam pembangunan didaerah.

Hal tersebut dapat dilihat dari data statistic Kabupaten Gorontalo Utara, jumlah Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 sebanyak 2.679 orang terdiri dari 1.026 orang laki-laki, dan 1.653 perempuan. Dengan komposisi golongan 1 sebanyak 530 orang, golongan 2 sebanyak 583 orang, golongan 3 sebanyak 1.681 orang, dan golongan IV sebanyak 406 orang, sebagian besar Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara adalah lulusan S1 yakni 1.616 orang. Sedangkan anggota

legislative yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 berjumlah 25 orang, yakni terdiri dari 21 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan. Data lain juga menunjukkan dari 31 badan dan dinas, serta kantor yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, hanya terdapat 3 SKPD yang dipimpin oleh perempuan. Dan terdapat kurang lebih 5 organisasi wanita serta 5 Kepala Desa yang dipimpin oleh seorang perempuan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sangat jelas perempuan dalam partisipasi publik itu masih belum maksimal, sehingga itu peneliti ingin mengkaji **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pertisipasi publik perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Kegiatan penelitian ini di harapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik pada tataran teoritis maupun praktis

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan simbangsih pemikiran dalam pengembangan teori administrasi publik khususnya di bidang implementasi. Serta di harapkan dapat dimanfaatkan sebagai dokumen akademik, yang berguna sebagai bahan masukan dan informasi bagi para peneliti yang membutuhkan kajian pengarusutamaan gender dalam konteks partisipasi publik perempuan.
- b. Manfaat praktis, peneliti ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal pengembangan kebijakan publik bagi pemerintah daerah khususnya di bidang implementasi

kebijakan pengarusutamaan gender dalam meningkatkan partisipasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender**

Menurut Faqih (2008:12) “keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-la- ki dapat terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut, keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.”

Menurut Faqih (2008:12) “Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut,kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.”

Faqih (2008; 12) “menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki mau pun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.” Selanjutnya Achmad M. dalam Faqih, (2008;13), “menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang, manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.”

Menurut Riant Nugroho (2008;9), ketidakadilan gender dapat berupa:

#### 1. Marginalisasi.

“Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masa- yarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman dan eksplorasi. Pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki, perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki, selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.”

Di Jawa misalnya, revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pemupukan dan pengendalian hama dengan

teknologi baru dilakukan oleh laki-laki; pekerjaan memotong padi dengan peralatan sabit dan mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan yang diasumsikan dimiliki oleh laki-laki, dan hal ini menyebabkan tergantikannya tenaga dan keterampilan perempuan dalam pertanian dengan alat panen ani-ani. Oleh karena itu tenaga perempuan diasumsikan lebih tepat di- gunakan untuk usaha konveksi dan pe- luang menjadi pembantu rumah tangga.

### 3. Sub-ordinasi.

Sub-ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai sub-ordinasi dari kaum laki-laki. Kenya-taan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hen-dak mengikuti tugas belajar, atau hen-dak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu mendapat izin dari istri.

### 4. Pandangan *stereotipe* (pelabelan).

*Stereotipe* dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu *stereotipe* yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai

ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pangan terhadap perempuan yang tutup gas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

#### 5. *Violence* (kekerasan).

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, atau majikan.

#### 6. Beban Kerja Ganda.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Bagi perempuan yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerejakan pekerjaan rumah tangga.

Perempuan dengan ekonomi lemah memiliki peran ganda yang mereka emban, yaitu sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah

untuk keluarga. Selain itu, penghasilan per- empuan hanya dianggap sebagai “peng- hasilan tambahan” bagi rumah tangganya. Perempuan dengan ekonomi lemah juga kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, karenan fasilitas publik di pedesaan masih minim dan bagi mereka yang tinggal di perkotaan juga harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkannya.

## **2.2 Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut wahab (1990:45), “proses implementasi baru dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai mencapai sasaran tersebut, proses implementasi kebijakan dinilai lebih penting dari seluruh kegiatan proses kebijakan.”

Lebih lanjut wahab (1990:45) “menegaskan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak harus ada, yaitu, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, sasaran program yakni masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, adanya pelaksana , baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut.”

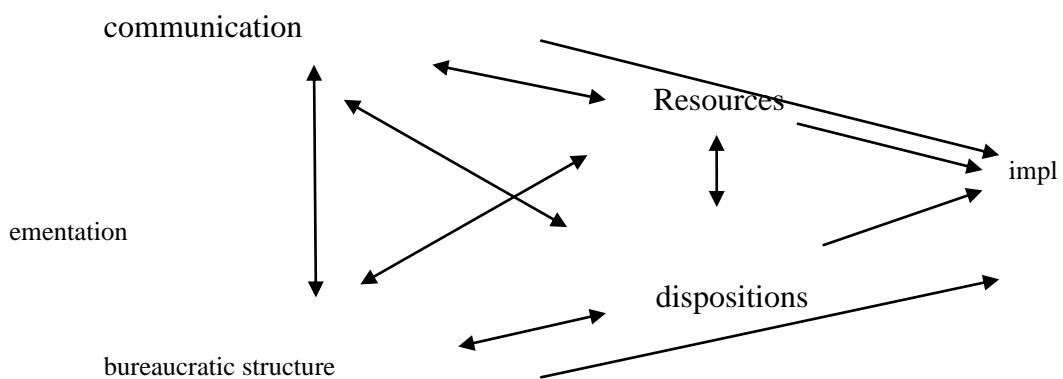
Tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Dalam konteks manajemen, implementasi kebijakan meliputi *organizing leading-controlling*. Salah satu contoh sebuah kebijakan

pemerintah adalah dirumuskannya suatu kebijakan terakit dengan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik.

Menurut kadji (2015:55) “apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut terakutualisasi, untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan.” maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan, yaitu

### 1) Model Edwards III

*Edwards III (1980:9) mengemukakan: “in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the preconditions for successful policy implementation?” untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka edwards III (1980:10) “menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan public,” yakni: “communication, resources, disposition, and bureaucratic structure”.*



Dari bagan terlihat jelas bahwa ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

1. Fakstор komunikasi (communication).

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, edwards III (1980:10) “menegaskan, proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksanaan karena pelaksanaan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten, apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.”

Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan. Sebaiknya, petunjuk-petunjuk yang berlalu lalang dapat menghambat implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi.

Tegasnya, bahwa apa yang dikomunikasikan dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan, mesti memperhatikan dan didukung oleh sistem transmisi yang baik, konsistensi dana kejelasan pesan dan perintah dari

pembuat kebijakan, yang harus dijalankan oleh implementor kebijakan secara baik, benar, dan procedural.

## 2. Faktor sumber daya (resources)

Sehubungan dengan faktor resource (sumber daya), edwards III (1980:10) “menjelaskan, selain itu variabel ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa seumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.”

Sumber daya yang penting antara lain “jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan menegnai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud dan fasilitas, termasuk bangunan-bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan.”

## 3. Faktor Diposisi (disposition)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, kembali edwards III (1980:10) “menjelaskan, disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi

mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.”

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Kecenderungan prilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implementor akan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4. Faktor struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Edwards III (1980:10) “menjelaskan, faktor struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan, struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.”

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan complex yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan komplektitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, memciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

### **2.3 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Pengarusutamaan Gender Terhadap Peartisipasi Perempuan**

Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia dilihat dari dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki, dan aktor kebijakan publik khususnya, “merupakan hal penting untuk diketahui pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.”

Dye (1995:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: “*publik policy is whatever government choose to do or not to do*”. “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” “Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan (tindakan)

pemerintah. apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.”

Definisi di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang seseungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan itu adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, hal-hal yang mempengaruhinya, serta dampak dari kebijakan publik tersebut dikerjakan atau tidak dilaksanakan. Pemerintah berhak memilih apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang tidak menyetujui kebijakan tersebut.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh keban (2004:55) “menjelaskan bahwa publik policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.konsep filosofis yang dimaksud adalah kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkain kesimpulan atau rekomendasi: dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya: dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.”

Substansi dari setiap produk kebijakan harus memperhatikan kondisi sasaran kebijakan, suatu suatu rekomendasi yang dihasilkan juga harus

memperhatikan berbagai program yang dapat dijalankan dan diimplementasikan sebagai mana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Wahab dan Rusli (2000:51-52) “lebih jauh menjelaskan sebagai berikut, kebijakan harus dipisahkan dari keputusan, paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan, yakni ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada keputusan, pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan dan kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.”

2). Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara top-down dengan bottom-up menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistik.

3). Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dari administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah melalui perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para

pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokan antara prilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.

4). kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (deliberate decisions not to act). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga meliputi keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tudak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingakap dimaa publik.

5). Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (unintended results) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.

6). Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit ataupun implicit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.

7). Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu dimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.

8). Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.

9). Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemrintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kecaburan antara sector publik dengan sektor swasta , disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diklarifikasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara

10). Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. hal ini berarti pengertian yang dimaksud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan operasional teori tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10) “untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik,” yakni:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Proses implementasi kebijakan, sangat tergantung pada komunikasi antara pimpinan dan pelaksana karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, tepat, dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Tegasnya, bahwa apa yang dikomunikasikan dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan, mesti memperhatikan dan didukung oleh sistem transmisi yang baik, konsistensi dan kejelasan pesan dan perintah dari pembuat kebijakan, yang harus dijalankan oleh implementor kebijakan secara baik, benar, dan prosedural.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sehubungan dengan faktor Resources (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya juga cukup berpengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

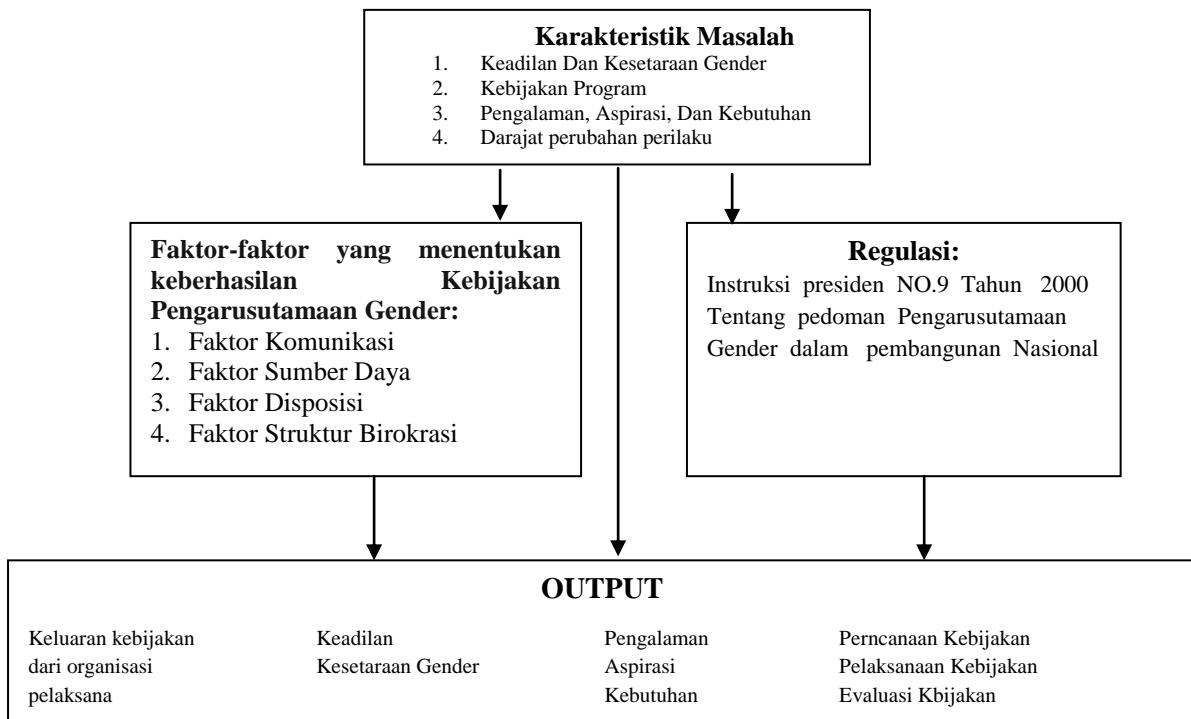
### 3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

Menyangkut disposisi yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, Disposisi yang diartikan sebagai keinginan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkenaan dengan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan Faktor Struktur organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk standart operation procedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak membias dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat Digambar dalam kerangka pikir sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah di Kantor dan Badan yang dipimpin oleh Perempuan, Serta Organisasi Wanita Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. “Pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap penelitian yang akan diungkapkan, dari pendekatan tersebut diperoleh interpretasi hasil penelitian.”

##### **3.2.2 Fokus Penelitian**

1. Implementasi Kebijakan
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan

##### **3.2.3 Informan Penelitian**

Yang menjadi informan penelitian adalah yang dianggap mampu memberikan informasi berhubungan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi public perempuan di kabupaten Gorontalo utara

##### **3.2.4 Sumber Data Penelitian**

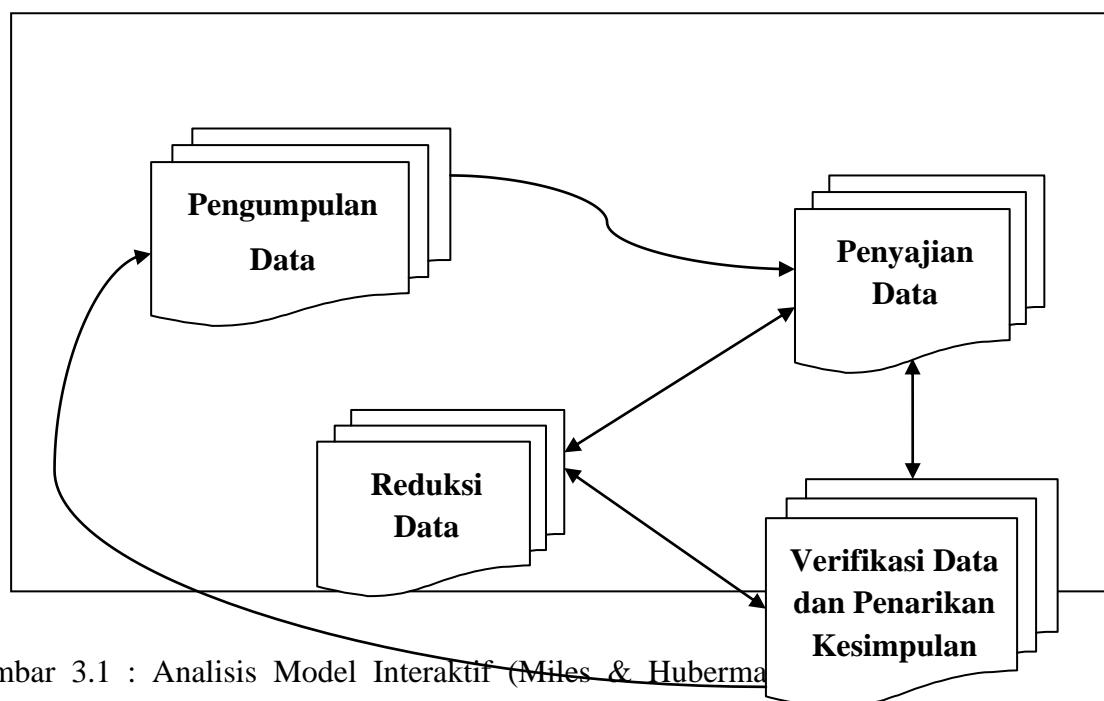
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain, berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.”

1. **Sumber Data Primer :** Data primer dari penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan.
2. **Sumber Data Sekunder :** Sedangkan data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, data statistic, dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis model interaktif (Miles & Huberman, 1992), yang terdiri dari tiga komponen analisis, sebagaimana pada gambar 3.1 dan penjelasan berikut ini.



Gambar 3.1 : Analisis Model Interaktif (Miles & Huberma

## 1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar member kemudian dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan strategi pelayanan data ke dalam sesuatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jenis sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi atau ditemui, termasuk kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

### **3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi data yang dikumpulkan selanjutnya menarik kesimpulan dari data-data yang telah diverifikasi.

#### **3.4 Pengecekan Keabsahan Data**

Sebagai tindak lanjut dari penelitian, maka perlu diadakan pengujian data yakni uji keabsahan data. Ada empat teknik pengujian keabsahan data, akan tetapi peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas.

Uji kredibilitas merupakan criteria untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan dilapakan. Artinya hasil hasil penelitian harus dapat dipercaya dan teruji kebenarannya. Peneliti adalah merupakan instrument dalam penelitian kualitatif, sehingga memungkinkan terjadi informasi bias, untuk menghindari hal itu perlu di uji kebenarannya, pengecekan kredibilitas perlu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Untuk memperoleh data valid, pengecekan data dilakukan mulalui:

- (1) pengamatan terus menerus, (2) triangulasi, (3) pengecekan atas kecukupan referensi. Teknik pengamatan terus menerus digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam fokus masalah penelitian, peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Pengecekan keabsahan data melalui teknik

triangulasi menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sember data yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari salah satu sumber yang lain. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengecek kembali keabsahan data dengan berulang-ulang kali. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicek lagi dengan observasi atau sebaliknya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Gorontalo Utara adalah wilayah administrative yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang disahkan melalui undang-undang Nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Secara geografis lebih dari 80 wilayah kabupaten Gorontalo utara merupakan wilayah pesisir dengan Panjang garis pantai mencapai 320 Km Persegi sekaligus merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra pasifik.

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah yang berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan laut Sulawesi; Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Sulawesi tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo dan sebelah timur berbatasan dengan provinsi Sulawesi Utara.

#### **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada Bab hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menggambarkan secara utuh hasil wawancara yang diungkapkan melalui fenomena dan data yang berhasil peneliti himpun dilapangan melalui informan peneliti yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara. Selanjutnya peneliti membedah hasil penelitian tersebut dengan membahas teori-teori pendukung yang

bersumber dari pendapat para ahli yang dijadikan peneliti sebagai aplikasi teori yang diungkapkan saat membahas fakta yang terjadi dilapangan. Setelah semuanya disusun, langkah terakhir peneliti menginterpretasikan maksud dan tujuan dari informan peneliti dengan kajian teori dari para ahli dan menggambarkan kesimpulan yang diangkat dalam penelitian ini yang dibahas sebagai berikut:

#### **4.2.1 Akses Perempuan Terhadap Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan Di Kabupaten Gorontalo Utara**

Kinerja dan dampak output yang tercapai merupakan wujud keberhasilan dari implementasi kebijakan. Terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, pengarusutamaan gender dapat dilihat dari proses dan hasil dari kebijakan yang diterapkan. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan berpendapat bahwa:

“... Implementasi kebijakan sejauh ini sudah bagus. hal ini dibuktikan dengan dukungan bupati terhadap perencanaan penganggaran yang responsive gender dan terhadap adanya Bimtek PUG. Selain itu bisa dilihat dari kepala OPD dan Camat perempuan. Harapan bupati supaya PUG di Daerah dapat maju. (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan/Mei 2021)

Selain itu, partisipasi public yang melibatkan perempuan dalam Pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Salah seorang masyarakat berkomentar bahwa:

“... Di Kecamatan saya itu camatnya adalah perempuan. Tapi menurut saya keterlibatan perempuan terhadap gender masih kurang optimal dibandingkan jika yang memimpin laki-laki. Keterlibatan perempuan menurut saya hanya cocok sebagai pelaksana teknis saja.

(Masyarakat Kecamatan Monano/Mei 2021)

Partisipasi publik perempuan juga diharapkan mampu menciptakan peran wanita untuk mencapai kondisi yang harmonis antara pria dan wanita dalam segala aspek priekhidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana proses penganggaran yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang melibatkan kaum perempuan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan mengatakan bahwa:

“... Di Gorut sudah menerapkan PUG dibuktikan dengan adanya perencanaan penganggaran yang responsive gender (PPRG). Hal ini membuktikan bahwa pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati mendukung adanya PUG ini. (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan)

Pengarusutamaan Gender (PUG) ialah strategi yang digunakan secara rasional dan sistematis dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam

aspek kehidupan manusia melalui kebijakan, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dalam kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2014:15) yang mengatakan bahwa pengarusutamaan gender yang dimaksud sebagai upaya untuk membuat program pembangunan daerah lebih peka dan responsive dalam memberikan program demi kepentingan masyarakat secara luas. Sebab setiap kebijakan akan lahir juga bersinggungan dengan kepentingan kaum perempuan secara khusus dan secara umum.

Nurhaeni (2009:13) membagi tahapan dalam analisis alur kerja gender sebagai berikut: 1) Tahap analisis kebijakan gender. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan akan responsive terhadap gender atau tidak. Langkah awal dalam kebijakan ini adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan. Selanjutnya data yang terpilih menurut jenis kelamin sebagai data yang membuka wawasan dan memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan; 2) Tahap Formulasi Kebijakan Gender. Pada tahap kedua ini dalam analisis gender sebagai kelanjutan dalam rangka merumuskan kebijakan yang responsive terhadap gender. Untuk itu diperlukan identifikasi tentang gender baik itu berupa data kuantitatif maupun kualitatif; 3) Rencana tindak kebijakan gender. Pada tahap ketiga ini merupakan aspek yang krusial karena tindak lanjut dari dua tahap sebelumnya. Apakah sebuah kebijakan dapat diimplementasikan atau tidak. Maka yang perlu diperhatikan adalah sasaran kebijakan yang perlu dirumuskan terhadap setiap rencana tindakan kebijakan yang telah disusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pendapat dari para ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan di Kabupaten Gorontalo Utara sangat membantu sektor pemerintahan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu implementasi pengarusutamaan gender terhadap paritisipasi public di Kabupaten Gorontalo Utara penting untuk diterapkan dalam rangka menghadirkan keseimbangan kebijakan yang ada di Daerah. Bupati dan Wakil sebagai pucuk pengambil kebijakan akan lebih memiliki banyak opsi dalam rangka merumuskan kebijakan bagi warganya.

#### **4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Partisipasi Publik Perempuan Di Kabupaten Gorontalo Utara.**

Dalam rangka mendisain dan mengimplementasikan sebuah kebijakan, peneliti menegaskan bahwa perlunya keterlibatan antara perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maupun monitoring dari kebijakan itu sendiri. Dalam konteks lokus di Kabupaten Goronalo Utara, dibutuhkan budaya kerja sama antara keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi public. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi PUG bahwa:

“... Faktor pendukung dari kebijakan pengarusutamaan gender salah satunya sekretaris daerah mengeluarkan humbauan percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender atau yang

disingkat (PPRG) dan edaran bupati tentang SK Focal poin. (Kepala Seksi PUG/Mei 2021)

Suatu kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran yang responsive mengandung ketetapan yang jelas untuk memperkecil adanya kesenjangan gender dalam pemeritahan dan keterlibatan perempuan dalam partisipasi public. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pasti terdapat hambatan-hambatan dalam OPD di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengimplementasikannya. Terkait dengan hal tersebut Kepala Seksi Pengarusutaman Gender mengatakan bahwa:

“... Yang menjadi penghambat dalam implementasi PUG adalah masih terdapatnya OPD yang kurang aktif dalam percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Gorut. Sehingga saya sedikit memyarankan agar komitmen setiap pegawai perlu ditingkatkan. (Kepala Seksi PUG/Mei 2021)

Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pemerintah Gorontalo Utara harus memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan didaerah. Terkait dengan

hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara mengatakan bahwa:

“... Kinerja pemerintah selama ini memang ada perkembangan tapi belum cukup signifikan. Buktinya Gorut sampai saat ini masih menjadi Kabupaten/Kota yang paling lamban pertumbuhannya dari berbagai aspek di Seluruh Provinsi Gorontalo. Sehingga saya sedikit menyarankan agar pemerintah lebih banyak membuka saran-saran dan partisipasi dari public untuk sama-sama memecahkan permasalahan didaerah. (Tokoh Masyarakat/Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, peneliti berpendapat bahwa hal yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Gorotnalo Utara akan berdampak sama besarnya dengan apa yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto (2008:12) bahwa Analisa kebijakan pemerintah terbagi atas lima, diantaranya: 1) Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas yang terstruktur dan lembaga pemerintah merupakan kegiatan politik; 2) Kebijakan yang incremental yang memandang bahwa variasi terhadap kebijakan dimasa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan dari pemerintah pada masa lalu yang dimodifikasi secara bertahap; 3) Teori permainan memandang bahwa kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang bersaing. Sistim politik turut mewarnai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan didukung oleh pendapat ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa perlunya control langsung dari Sekretaris Daerah dan Bupati Kabupaten Gorontalo Utar terkait penguasaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. yang perlu diawasi apakah pengawasan PPRG menyentuh aspek gender atau tidak, sehingga keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan peneliti pada Bab sebelumnya maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akses perempuan terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara belum optimal dan kurang seimbang. Terdapat perbedaan antara pendapat pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menganggap percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) sudah berjalan dengan optimal akan tetapi pendapat masyarakat tentang perempuan dalam partisipasi publik belum cukup seimbang dibandingkan dengan laku-laki.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara dipengaruhi oleh Kebijakan Bupati Dan Sekretaris Daerah terkait percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). Akan tetapi hal ini belum dimaksimalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap kurang responsif dalam menyelesaikan PPRG.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan ketegasan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara serta Sekretaris Daerah kepada Organisasi Perangkat daerah untuk menjalankan PPRG dengan terencana, responsive dan akuntabel.
2. Diharapkan control perempuan dalam pengambilan keputusan erkait pelaksanaan program kebijakan yang selama ini hanya didominasi oleh laki-laki.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai terhadap penerapan PPRG melalui bimbingan teknis dan sosialisasi di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara,. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan. Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial Seba- gai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Instruksi presiden NO.9 Tahun 2000 Tentang pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep. Rohidi. Jakarta : UI Press, 1992
- Nurhaeni, I. D. A. (2009). *Kebijakan publik pro gender*. Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Universitas Sebelas Maret
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siti Hariti Sasmri. 2009. Gender and Politics. Yogyakarta: Tiara Wacana PSW

UGM

Lampiran Pedoman Wawancara:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PARTISIPASI PUBLIK PEREMPUAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA.**

Nama Peneliti : Menong Puspita Sari Abdullah  
NIM :  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama (bolehtidak di isi) :  
Umur : Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan   
Pendidikan Terakhir :  
Masa Kerja :

**WAKTU PELAKSANAAN**

Tanggal :

Tempat :

Waktu :

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i)untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disediakan.
- Berilah jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara (i) anggap paling benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**Pertanyaan kepada informan kunci yakni perempuan yang terlibat dalam partisipasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara:**

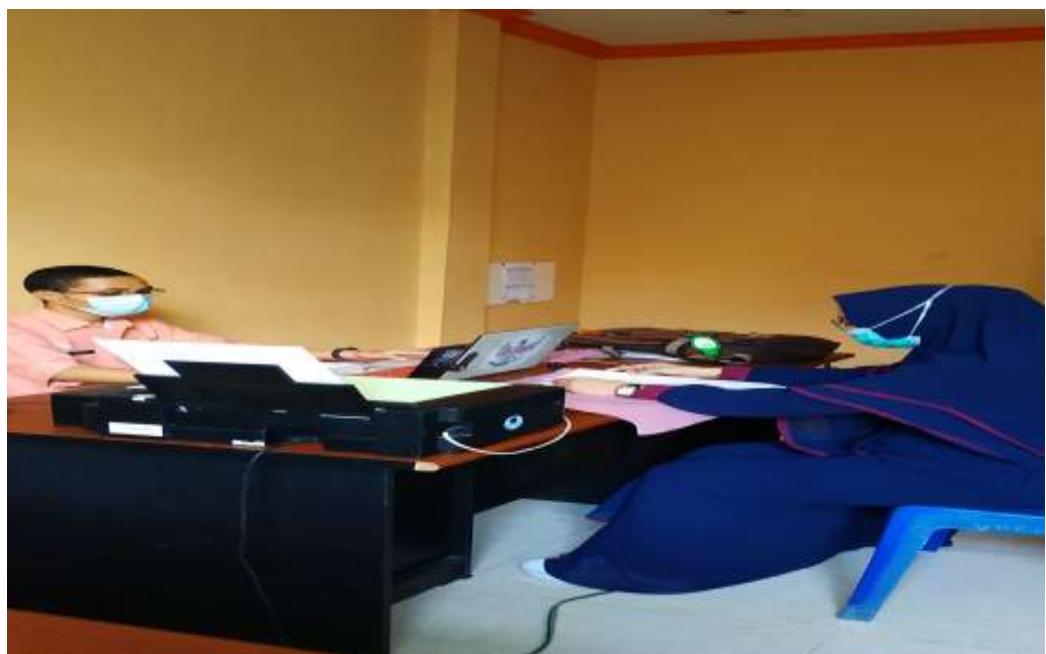
1. Bagaimana pendapat ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara ini?

2. Sejauhmana pengarusutamaan gender diterapkan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Sudah efektifkan program-program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait tpartisipasi public perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara?
4. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi pengarusutamaan gender dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara?
5. Apa saran ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kedepannya?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



(wawancara dng kplka seksi PUG /29 april 2021)



(wawacara dengan anggota seksi PUG/6 mei 2021)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
Jln. Kusno danupoya Desa Malingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/DPPPA/064 / V /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Magdalena Lungkang, SH, M.Adm.Pemb  
Nip : 19620723 199403 2 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV C  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Menong Abdullah  
Nim : S2117125  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Mengetahui

Kepala Dinas PPPA

Magdalena Lungkang, SH, M.Adm.Pemb

Nip. 19620723 199403 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3251/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara  
di,-

Tempat

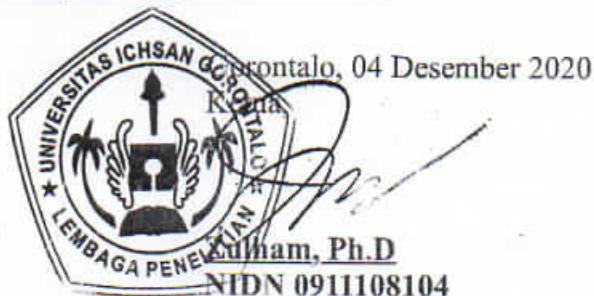
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Menong Abdullah  
NIM : S2117125  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGRUSUTAMAN GENDER DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0860/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MENONG ABDULLAH  
NIM : S2117125  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dlm partisipasi publik perempuan di kab. Gorut

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Juni 2021  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI FULL MENONG (1).docx

Jun 8, 2021

5942 words / 41367 characters

# SKRIPSI\_MENONG PUSPITASARI ABDULLAH.docx

## Sources Overview

**29%**

OVERALL SIMILARITY

1	media.neliti.com INTERNET	26%
2	adoc.tips INTERNET	2%
3	repository.ung.ac.id INTERNET	1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None

## **ABSTRAK**

### **MENONG ABDULLAH. S2117125 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PARTISIPASI PUBLIK PEREMPUAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akses perempuan terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara belum optimal dan kurang seimbang. Terdapat perbedaan antara pendapat pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menganggap percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) sudah berjalan dengan optimal akan tetapi pendapat masyarakat tentang perempuan dalam partisipasi publik belum cukup seimbang dibandingkan dengan laku-laki; 2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam partisipasi publik perempuan di kabupaten gorontalo utara dipengaruhi oleh Kebijakan Bupati Dan Sekretaris Daerah terkait percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). Akan tetapi hal ini belum dimaksimalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap kurang responsif dalam menyelesaikan PPRG.

Kata kunci: pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat



## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas**

Nama : Menong Abdullah  
Nama Panggilan : Menong  
Nim : S2117125  
Tempat Tanggal Lahir : Sumalata 30 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Angkatan : 2017  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Status : Mahasiswa Karyawan  
Agama : Islam  
Alamat : Aspol Polres Gorontalo Kota  
Nama Ayah : Yakob Abdullah  
Nama Ibu : Nurjana Pulu



### **B. Riwayat Pendidikan**

- 1. SDN BULOTIO BARAT : 2007**
- 2. SMPN 1 SUMALATA : 2010**
- 3. SMA NEGERI 1 SUMALATA :2013**